

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah adalah salah satu entitas umum yang wajib menyusun laporan keuangan. Sebagai entitas yang melaksanakan program, tentu diperlukan pertanggung jawaban atas pelaksanaannya. Pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, tentu saja tidak lepas dari penggunaan sumber daya material terutama uang. Sehingga di dalam Pasal 23 UUD 1945 menetapkan bahwa pemerintah berkewajiban menyajikan laporan keuangan terkait program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun berjalan.

Laporan keuangan adalah komponen penting bagi entitas dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya. laporan keuangan menyajikan angka – angka yang menampilkan jumlah harta, hutang , beban, aliran uang, serta laba perusahaan. Laporan keuangan dengan kata lain adalah rangkuman dari kegiatan entitas selama satu periode berjalan yang disajikan dalam bentuk angka. Sehingga kita dapat mengetahui kegiatan apa saja yang terjadi disana, kemana uang dialokasikan, perkembangan entitas, perkembangan laba dan sebagainya.

Fungsi laporan keuangan sendiri adalah sebagai informasi. Informasi yang dihasilkan digunakan untuk keperluan yang berbeda – beda sesuai dengan kebutuhannya. Informasi dari laporan keuangan entitas berorientasi profit akan digunakan oleh para pemegang saham dan manajemen sebagai bahan pertimbangan

untuk menentukan langkah yang akan diambil selanjutnya guna kelangsungan perusahaan. Informasi yang dihasilkan oleh laporan keuangan entitas non-profit akan digunakan sebagai laporan kinerja organisasi.

Laporan keuangan Pemerintah atau yang biasa disingkat (LKP) adalah sebagai bentuk dari pertanggung jawaban pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatannya. LKP seperti layaknya laporan keuangan, akan memberikan informasi mengenai kinerja pemerintah selama satu periode. Informasi yang dihasilkan haruslah informasi yang relevan dan andal, agar keputusan yang dihasilkan atas dasar informasi tersebut dapat memberikan solusi yang tepat dan hal ini dihasilkan dari laporan keuangan yang berkualitas. Menyediakan informasi dari laporan berkualitas itu penting karena secara positif akan memberikan pengaruh pada penyedia modal dan pemegang saham dalam membuat keputusan investasi, kredit, dan alokasi dana dalam meningkatkan efisiensi dari keseluruhan pasar (IASB, 2008). Laporan keuangan yang berkualitas juga mencerminkan kinerja yang baik. Mempertahankan kualitas laporan keuangan dengan baik maka kita menjaga kepercayaan masyarakat (Mulyani : 2017).

Tolak ukur sebuah LKP berkualitas salah satunya adalah opini yang dikemukakan oleh BPK. WTP, atau wajar tanpa pengecualian adalah opini dengan tingkat pencapaian terbaik. Opini WTP menunjukkan bahwa entitas bersangkutan menyajikan sebuah laporan keuangan dengan baik dan benar. Meskipun begitu, diraihnya opini WTP saja oleh suatu entitas tidak dapat dijadikan tolak ukur bahwa laporan keuangannya tidak memiliki masalah.

Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI yang diterbitkan dalam bentuk IHPS, temuan temuan semester II disajikan dalam gambar tabel berikut

Pemerintah/ Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi
Pemerintah Pusat	56	593	1.437
Pemeriksaan Kinerja	24	256	646
Pemeriksaan DTT	32	337	791
Pemerintah Daerah, BUMD & BLUD	355	3.294	9.590
Pemeriksaan Keuangan	5	76	165
Pemeriksaan Kinerja	205	2.008	5.848
Pemeriksaan DTT	145	1.210	3.577
BUMN dan Badan Lainnya	38	543	1.343
Pemeriksaan Keuangan	1	-	-
Pemeriksaan Kinerja	10	108	240
Pemeriksaan DTT	27	435	1.103
Total	449	4.430	12.370
Pemeriksaan Keuangan	6	76	165
Pemeriksaan Kinerja	239	2.372	6.734
Pemeriksaan DTT	204	1.982	5.471

**Gambar 1.1 Tabel Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan,, dan Rekomendasi BPK Semester II Tahun 2017**

Gambar tabel diatas menunjukkan ringkasan dari 449 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester II tahun 2017 yang terdiri atas 6 LHP keuangan (1%), 239 LHP kinerja (53%) dan 204 LHP dengan tujuan tertentu (DTT) (46%). hasil dari pemeriksaan yang dilakukan BPK, secara umum mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan atas laporan keuangan memuat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas empat laporan keuangan. selain itu ditemukan dari hasil pemeriksaan kinerja bahwa pelaksanaan pelayanan masih belum sepenuhnya efektif karena terdapat permasalahan yang mempengaruhi pencapaian tujuan. Hasil dari pemeriksaan DTT pula mengemukakan Sistem Pengendalian Intern (SPI)

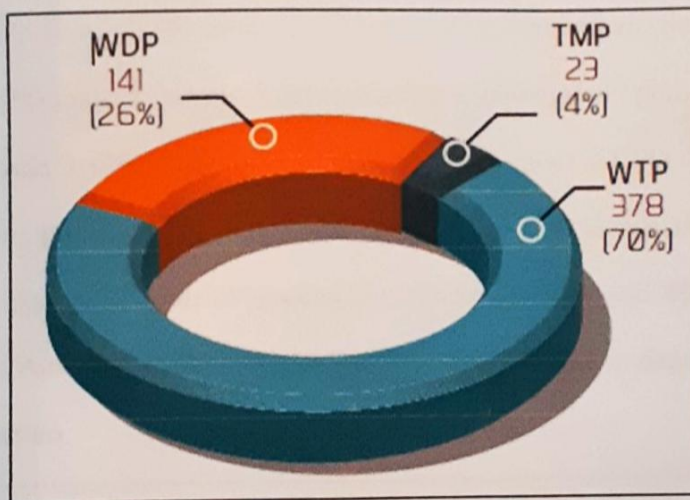
belum sepenuhnya memadai dan masih terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara lebih terperinci, dalam IHPS Semester II ini BPK mengemukakan dari 4430 temuan tersebut, terdapat 5852 permasalahan meliputi 1.082 (19%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 1.950 (33%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp10,56 triliun, serta 2.820 (48%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,67 triliun. Dari permasalahan ketidakpatuhan itu, sebanyak 1.452 (74%) senilai Rp10,56 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian sebanyak 840 (58%) permasalahan senilai Rp1,46 triliun. Potensi kerugian sebanyak 253 (17%) permasalahan senilai Rp5,04 triliun. Kekurangan penerimaan sebanyak 359 (25%) permasalahan senilai Rp4,06 triliun. Selain itu, terdapat 498 (26%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi. Seperti yang telah dijelaskan oleh penulis, hal tersebut juga dijelaskan dalam IHPS berupa tabel sebagai berikut

Keterangan	Pemerintah Pusat		Pemerintah Daerah BUMD & BLUD		BUMN & Badan Lainnya		Total	
	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)
A. Kelemahan SPI	156	-	625	-	301	-	1.082	-
• Kelemahan SPI	156	-	625	-	301	-	1.082	-
B. Ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan	362	1.347.564,19	1.273	2.051.020,69	315	7.169.510,84	1.950	10.568.095,72
• Ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan								
> Kerugian	233	1.154.103,82	556	207.559,25	51	99.351,40	840	1.461.014,47
> Potensi Kerugian	17	77.029,18	205	1.717.955,15	31	3.245.709,32	253	5.040.693,65
> Kekurangan Penerimaan	50	116.431,19	221	125.506,29	88	3.824.450,12	359	4.066.387,60
Subtotal	300	1.347.564,19	982	2.051.020,69	170	7.169.510,84	1.452	10.568.095,72
• Penyimpangan Administrasi	62	-	291	-	145	-	498	-
C. Temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	307	492.147,79	2.336	35.082,38	177	2.148.368,93	2.820	2.675.599,10
• Ketidakhematan	13	128.598,39	41	27.080,98	15	129.863,44	69	285.542,81
• Ketidakefisienan	-	-	6	-	6	51.069,91	12	51.069,91
• Ketidakefektifan	294	363.549,40	2.289	8.001,40	156	1.967.435,58	2.739	2.338.986,38
Total (A+B+C)	825	1.839.711,98	4.234	2.086.103,07	793	9.317.879,77	5.852	13.243.694,82
Nilai penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/ daerah/ perusahaan		11.041,08		48.015,12		6.855,02		65.911,22

**Gambar 1.2 Tabel Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2017**

IHPS II Tahun 2017 mengungkapkan hasil pemeriksaan atas 5 LKPD Tahun 2016 dari 542 pemda yang wajib menyerahkan LKPD Tahun 2016. Lima LKPD Tahun 2016 tersebut terlambat disampaikan kepada BPK untuk diperiksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan atas 537 LKPD Tahun 2016 telah dilaporkan dalam IHPS I Tahun 2017. Dengan demikian, sampai dengan IHPS II Tahun 2017, BPK telah melaporkan seluruh (542) hasil pemeriksaan atas LKPD 2016. Terhadap pemeriksaan atas 5 LKPD Tahun 2016, BPK memberikan opini WTP atas 3 LKPD dan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 2 LKPD. Dengan demikian, atas seluruh (542) LKPD Tahun 2016, BPK memberikan opini WTP atas 378 (70%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 141 (26%) LKPD, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat

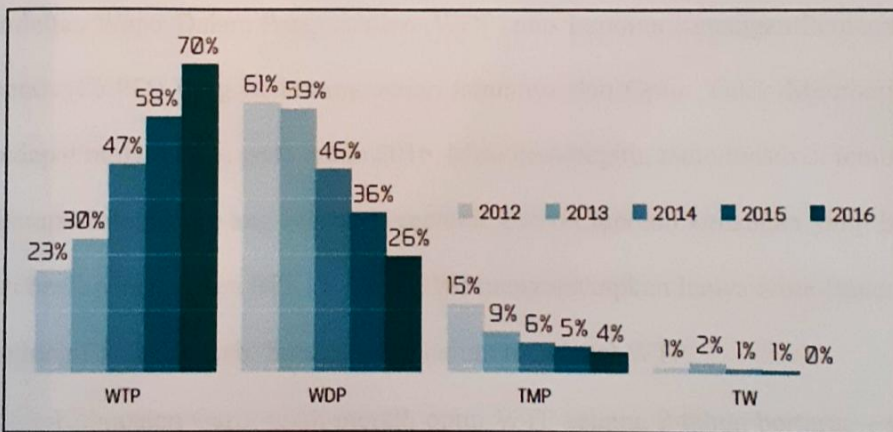
(TMP) atas 23 (4%) LKPD seperti terlihat dalam grafik. Untuk penyusunan LKPD Tahun 2016 tersebut, seluruh pemda telah menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).



**Gambar 1.3 Grafik Opini atas LKPD 2016**

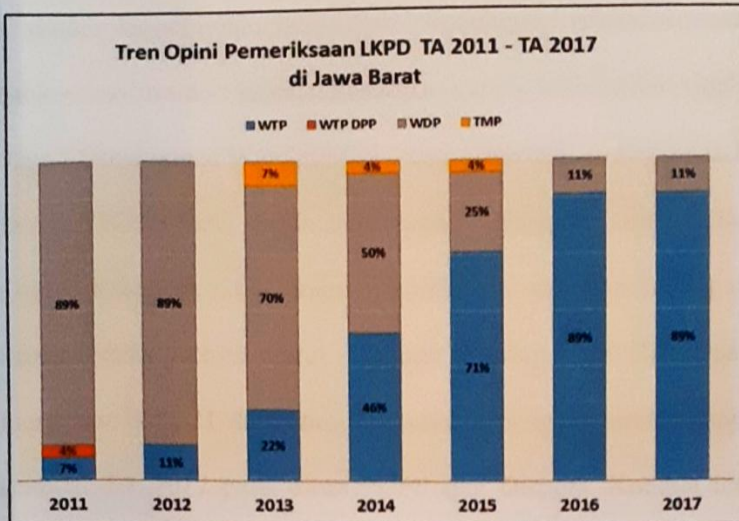
Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai oleh 31 dari 34 pemerintah provinsi (91%), 275 dari 415 pemerintah kabupaten (66%), dan 72 dari 93 pemerintah kota (77%). Capaian opini tersebut telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemda/ program peningkatan kapasitas keuangan pemda yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 masing-masing sebesar 85%, 60%, dan 65% pada tahun 2019. Sebaran opini atas LKPD 2016 selengkapnya disajikan pada Gambar 2.1. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015, kualitas LKPD Tahun 2016 mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan kenaikan opini WTP sebesar 12 poin persen yaitu dari 58% pada LKPD Tahun 2015 menjadi 70% pada LKPD Tahun 2016. Pada LKPD Tahun

2015, sebanyak 313 dari 542 LKPD memperoleh opini WTP (58%), sedangkan pada LKPD tahun 2016 sebanyak 378 dari 542 LKPD memperoleh opini WTP (70%). Selain kenaikan jumlah opini WTP, juga terjadi kenaikan opini dari opini Tidak Wajar (TW) atau TMP menjadi opini WDP sebanyak 15 LKPD. Dalam 5 tahun terakhir (2012-2016), opini LKPD mengalami perbaikan. Selama periode tersebut, LKPD yang memperoleh opini WTP naik sebanyak 47 poin persen, yaitu dari 23% pada LKPD Tahun 2012 menjadi 70% pada LKPD Tahun 2016. Sementara itu, jumlah LKPD yang memperoleh opini TMP mengalami penurunan sebanyak 11 poin persen dari 15% pada LKPD Tahun 2012 menjadi 4% pada LKPD Tahun 2016. Perkembangan opini LKPD selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini



**Gambar 1.4 Grafik Perkembangan Opini LKPD Tahun 2012-2016**

Untuk Provinsi Jawa Barat sendiri, raihan opini WTP untuk tiap kabupaten yang ada di provinsi Jawa Barat, setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dalam situs BPK seperti yang ditunjukkan oleh grafik di bawah ini



**Gambar 1.5 Grafik Tren Opini Pemeriksaan LKPD Jabar**

Dalam lima tahun terakhir, Kabupaten di Provinsi Jawa Barat berangsur - angsur dapat memperbaiki kualitas laporan keuangannya. Terlihat dari presentase perolehan Wajar Dalam Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkurang setiap tahunnya dan Opini Tidak Memberikan Pendapat mulai hilang pada tahun 2016. Meskipun begitu, tentu masih di temukan beberapa kabupaten yang belum memenuhi kriteria laporan keuangan yang baik. Dari hasil pemeriksaan BPK, Syifa (2018) mengungkapkan hanya Kota Bandung, Bandung Barat dan Kab. Subang yang belum mendapat WTP.

Kabupaten Garut telah meraih opini WTP selama 2 tahun berturut - turut pada tahun 2015 dan 2016. Tetapi dari hasil pemeriksaan BPK, yang dirangkum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun (2016), ditemukan sejumlah kesalahan pencatatan dan kesalahan penilaian di periode sebelumnya. Sehingga terjadi selisih nilai koreksi yang besar yang mengakibatkan ketidak



sesuaian antara laporan dan bukti fisik di lapangan. Ketidaksesuaian tersebut menyebabkan kualitas dari laporan keuangan kurang baik karena tidak *reliable*.

Garut Governance Watch (GGW) mempertanyakan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Kabupaten Garut selama tiga kali berturut-turut. Pasalnya, GGW menilai kondisi pengelolaan keuangan di Pemkab Garut masih terbilang carut marut. Menurut (Ferdinal : 2018) temuan masih ada saat pemeriksaan BPK RI, diantaranya, kesalahan penganggaran belanja barang dan belanja modal TA 2017 pada dinas PUPR dan Dispora. Kondisi tersebut diatas mengakibatkan laporan keuangan tidak mencerminkan akun jenis belanja sebenarnya sehingga dragukan keandalannya. (Akbar, 2018)

Faktor seperti sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal memberikan kontribusi besar atas kualitas laporan keuangan. Diantara tiga faktor tersebut, faktor sumber daya manusia lah yang paling utama karena kegiatan dan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan dilakukan oleh manusia. Pendapat ini diperkuat pula oleh penelitian yang telah dilakukan Roviyantie (2011:59) mengemukakan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut Spencer dan Spencer dalam Wibowo (2010:325) karakteristik kompetensi terdiri dari lima komponen utama. Tetapi, pengetahuan dan Keterampilan adalah kunci utama dan yang paling terlihat.

Namun, pada praktiknya di lapangan, kompetensi selalu menjadi permasalahan terutama pengetahuan dan keterampilan adalah hal yang agak sulit didapatkan. Sehingga tidak jarang selalu ada saja entitas (terutama pemerintahan)

yang laporan keuangan yang dihasilkannya kurang baik akibat sumber daya manusia nya tidak memiliki dasar pengetahuan akuntansi dan keterampilan yang mumpuni. Akbar, Bahrullah (2017) berpendapat bahwa kualitas sumber daya manusia dalam bidang akuntansi perlu ditingkatkan dikarenakan penemuan – penemuan Badan Pemeriksa Keuangan dilapangan yang seringnya dikarenakan oleh SDM yang kurang mumpuni.

Pada saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerapkan sistem pelaporan keuangan daerah berbasis akrual, tampak sekali pemerintah daerah di Jawa Barat belum memiliki SDM yang mumpuni. Ini terlihat dari hasil pemeriksaan BPK terkait laporan keuangan pemda 2015. Jadi tidak bisa hanya sekedar mengandalkan sistem akuntansi aplikasinya, tidak bisa (Arman, 2015) usai menyerahkan hasil laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Jabar tahun anggaran 2015, di kantor BPK Perwakilan Jabar, Kota Bandung. (Arman, 2015) menyatakan seorang penyaji laporan keuangan haruslah mampu mengoreksi berbagai catatan keuangan seperti mengakui piutang, utang, dan beban keuangan setiap tahunnya. Tanpa pemahaman itu, rata-rata bermasalah. (Kurniawan, 2016).

Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menyebut tiga alasan mengapa lembaganya tidak mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Salah satunya, masalah sumber daya manusia (SDM)"dikarenakan tiga hal yaitu kapasitas SDM, pelaksana kegiatan yang masih terbatas. Lalu kelengkapan administrasi yang untuk mengelola kegiatan itu belum ada SOP (Munaf, 2017). BPK tidak menyatakan pendapat (disclaimer) terhadap laporan keuangan Bekraf. Triawan menuturkan, pihaknya baru pindah gedung pada

Juli 2016 dan baru mendapat sekretaris utama pada Agustus. Triawan menjamin, Bekraf akan memperbaiki laporan keuangannya untuk dapat meraih WTP pada tahun ini. Mereka akan menambah pegawai dan pembenahan lainnya. "Kan ada yang dua tahun berturut-turut disclaimer, kita mudah-mudahan tidak," jelas dia. (Bayu Aji, 2017).

Di kasus Kabupaten Garut, setelah penulis melakukan observasi dengan melakukan wawancara lapangan, ternyata walaupun para pegawai dapat mengerjakan laporan keuangan, mereka tidak memiliki basis pendidikan akuntansi dan hanya mengandalkan pengalaman dan pengetahuan yang didapatkan selama bekerja. Hal ini diungkapkan oleh para pegawai bagian akuntansi di Disdukcapil, walaupun tidak ada kendala dalam melakukan penyusunan laporan keuangan, para ASN tidak ada yang memiliki latar belakang akuntansi. Pernyataan serupa dilontarkan oleh Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Kab. Garut, pegawai yang memiliki latar belakang akuntansi, yang bekerja di bagian akuntansi hanya satu orang saja, yang lainnya berasal dari latar belakang berbeda. Selain itu hanya berdasarkan cocok atau tidaknya pegawai bekerja di bidang tersebut. Apabila cocok maka diteruskan kalau tidak diganti dengan yang lain (Setiawan, 2018). Hal ini dapat menyebabkan kesalahan terutama dalam menentukan nilai yang harus dicatat. Selain itu pengetahuan yang didapatkan dari pengalaman bekerja tidak terlalu mendalam, dan dapat berubah sewaktu waktu.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan replikasi yang sebelumnya dilakukan oleh Iftitah Dian Humairoh (2013) dengan judul "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Jember). Pada penelitian yang dilakukan oleh Humairoh (2013) diantaranya :

1. Penelitian dilakukan pada SKPD Kabupaten Jember
2. Teknik sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling

Yang menjadi perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Humairoh (2013) adalah :

1. Penelitian dilakukan pada SKPD di Kabupaten Garut
2. Teknik Sampel yang digunakan adalah Non Probability Sampling dengan pendekatan Simple Random Sampling.

Berdasarkan fenomena – fenomena diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut apakah kompetensi pegawai terutama pengetahuan dan keahlian berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan judul topik “PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI PADA SKPD TEKNIS DI KABUPATEN GARUT)”

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis sampaikan, masalah – masalah yang ditemukan antara lain

1. Diperlukan kompetensi SDM di bidang akuntansi yang mumpuni dalam menyusun laporan keuangan agar mencapai kualitas laporan keuangan yang baik

2. Walaupun laporan keuangan mendapatkan WTP, masih sering ditemukan kesalahan dalam penilaian dan pencatatan sehingga menimbulkan perbedaan antara kondisi fisik lapangan dan laporan
3. Latar belakang pendidikan SDM menjadi faktor masalah menonjol karena ketidaksesuaian antara pendidikan dan pekerjaan yang digeluti.

### **1.2.2. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah diatas, rumusan masalah penelitian ditetapkan sebagai berikut :

1. Bagaimana kompetensi SDM pada SKPD Teknis di Kabupaten Garut
2. Bagaimana kualitas laporan keuangan SKPD Teknis di Kabupaten Garut
3. Seberapa besar pengaruh dari kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Teknis di Kabupaten Garut

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana kompetensi SDM pada SKPD Teknis di Kabupaten Garut
2. Mengetahui bagaimana kualitas laporan keuangan SKPD Teknis di Kabupaten Garut
3. Mengetahui seberapa besar kompetensi SDM mempengaruhi kualitas laporan keuangan SKPD Tekniso di Kabupaten Garut

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat berguna dan memiliki manfaat antara lain

##### **1. Bagi Penulis**

Meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam bidang akuntansi sektor publik yang sesuai dengan teori yang diperoleh dalam perkuliahan dan mewujudkan mimpi dalam bentuk skripsi

##### **2. Bagi Penulis Lain**

Sebagai bahan referensi dan informasi pendukung dalam penelitian selanjutnya, yang diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk penelitian selanjutnya

##### **3. Bagi Bidang Ilmu**

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan pengayaan lebih mendalam tentang akuntansi sektor publik, terutama mengenai pengaruh pengetahuan akuntansi dan keahlian pegawai terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

##### **4. Bagi Pemerintah**

Diharapkan dapat memberikan saran serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah

#### **1.5 Lokasi dan waktu penelitian**

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian hanya pada SKPD Teknis yang ada di Kab. Garut untuk memperoleh data sesuai dengan objek yang diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan.-

